

# **DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**Itsnaini Chusnul Khotimah**

STIT Al Quran Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

*email: chusnulchan27@gamil.com*

## ***Abstract***

*The Earth and building tax is a tax that must be paid by any citizen who owns the Earth and the building. The tax is managed by the office in the district or city and as the regional original revenue for a district or city. Of course in carrying out its duties there are several obstacles faced by the district office or the city. Therefore, the restorers examine the determinant of the taxpayer compliance that occurred at the Regional Revenue Board of Muara Enim regency. The study uses quantitative descriptive methods and data analysis, the pattern of relations between exogenous and endogenous variables in research illustrated using the Partial Least Square-Path Modeling (PLS-PM) approach. In this study found supporting and inhibitory factors of citizens in complying with paying the Earth and building tax on the Revenue board of Muara Enim regency. Taxpayer compliance, taxpayer awareness and socialization services become an influence for Warga in the Mematihu to pay the Earth and building tax on the income agency of Muara Enim regency. The influence of other factors is 27.8% against taxpayer compliance.*

***Keywords:*** *determinant, obedience, tax on earth and building*

## **Abstrak**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang wajib dibayar oleh setiap warga yang memiliki bumi dan bangunan. Pajak tersebut dikelola oleh kantor dinas dalam kabupaten atau kota dan sebagai pendapatan asli daerah bagi sebuah kabupaten atau kota. Tentu saja dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas kabupaten atau kota. Untuk itu penulis meneliti determinan kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan analisis data, pola hubungan antara variable eksogen dan endogen dalam penelitian digambarkan dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square-Path Modeling (PLS-PM). Dalam penelitian ini ditemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat warga dalam mematuhi membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan layanan sosialisasi menjadi pengaruh bagi warga dalam mematuhi membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Adapun pengaruh faktor lain sebesar 27,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci :** Determinan, Kepatuhan, Pajak Bumi Dan Bangunan

## Pendahuluan

Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) adalah merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proposi tertentu. Namun guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada, maka paling lambat pada tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, semula bernama Dinas Pendapatan Kabupaten Muara Enim. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim mempedomani Peraturan Bupati No 23 tahun 2017 Tanggal 17 Mei Tentang rincian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Dimana pada BAB II Pasal 2 “Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”

Adapun berdasarkan catatan Kas Daerah Kabupaten Muara Enim yang telah diaudit oleh BPK untuk pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut :

**Tabel Pendapatan Pajak Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Anggaran</b>			
2014	60.099.229.197,00	66.261.340.355,00	110,25
2015	85.065.418.945,00	70.755.225.873,05	83,18
2016	51.767.967.010,00	52.989.339.855,05	102,36
2017	56.346.779.302,00	62.955.254.159,53	111,73
<b>Jumlah</b>	<b>253.279.394.454,00</b>	<b>252.961.160.223,08</b>	<b>101,88</b>

Berdasarkan data dari Sang Sistem pengelolah Administrasi Data PBB P2 (SISMIOP)

**Tabel Target dan Realisasi PBB P2**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Anggaran</b>			
2014	8.481.825.099,00	7.084.186.026,00	83,52
2015	8.481.825.099,00	6.836.885.213,00	80,61
2016	11.865.397.510,00	8.229.609.039,00	69,36
2017	11.983.029.302,00	8.866.521.356,00	73,99

Bila melihat pada tabel diatas kita mengetahui adanya penurunan presentase realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun 2014 ke tahun 2015. Dan peningkatan presentase realisasi dari tahun 2016 ke tahun 2017. Fluktuasi pendapatan pajak daerah tersebut tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Salah satunya adalah Pajak Daerah yaitu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Dari permasalahan diatas, penulis ingin malakukan penelitian mengenai kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membatar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dinilai melalui layanan, sosialisasi dan kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul “ Determinan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim)”.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif (*descriptive quantitative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan tentang sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan atau objek penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta pengujian statistik. Sedangkan sifat penelitian ini adalah menguraikan dan menjelaskan (*descriptive explanatory*) yang berkaitan dengan kedudukan satu variable serta hubungannya dengan variable yang lain. Populasi yang di ambil adalah seluruh Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang terdaftar di badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Yang berjumlah 3.966.750 Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.<sup>1</sup> Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut<sup>2</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Jadi sampel yang diambil adalah 100 Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilaksanakan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul<sup>3</sup>. Untuk tujuan analisis data, pola hubungan antara variable eksogen dan

---

<sup>1</sup> Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P.,2012, Statistika Untuk Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 13

<sup>2</sup> Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. Hlm. 81

<sup>3</sup> Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. hlm. 207

endogen dalam penelitian digambarkan dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square-Path Modeling* (PLS-PM).

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian penyusun. Instrumen dalam penelitian penyusun berupa angket yang berisi pernyataan- pernyataan tentang Kepemimpinan, Layanan, Sosialisasi , dan Kesadaran Wajib Pajak.

**Table Instrumen Penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator	Jumlah
Kepatuhan Wajib Pajak, (No.544/KMK.04/2000)	Tepat waktu	Tepat waktu pembayaran	7
		Tidak memiliki Pajak terhutang	
	Pembukuan Audit Objek Pajak	Membayar denda Pajak	
		Menerima bukti pembayaran	
		Cap lunas pembayaran	
		Kesesuaian nilai Objek Pajak Kesesuaian Nilai NJOP	
Layanan (X1) (Hanif Nurcholis, 2017)	Transparansi	Pelayanan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak	5
		Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	
	Akuntabilitas	Pelayanan dapat dipertanggung jawabkan	
	Kondisional	Pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan	
Kesamaan Hak	Tatacara Sosialisasi Pajak	Pelayanan yang tidak melakukan tindakan diskriminasi	6
		Sosialisasi diadakan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku	
		Sosialisasi dilakukan oleh pegawai pajak	
		Sosialisasi dilakukan secara teratur	
		Sosialisasi yang diadakan bertujuan memberikan informasi	
Frekuensi Sosialisasi Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sosialisasi memberikan pengetahuan baru	
		Sosialisasi yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi	
Sosialisasi (X2) (Arya Yogatama : 2014)	Kejelasan Sosialisasi		

Kesadaran Wajib Pajak (X3) (Jatmiko : 2006)	Persepsi Wajib Pajak tentang Penggunaan Dana Pajak	Wajib Pajak memiliki persepsi positif terhadap PBB P2	4
	Tingkat Pengetahuan dalam kesadaran Membayar Pajak	Wajib Pajak menikmati fasilitas dari pembangunan daerah	
	Kondisi Keuangan Wajib Pajak	Wajib Pajak mengetahui manfaat dan fungsi PBB P2	
		Wajib Pajak memiliki kemampuan untuk membayar Pajak	

### Hasil Uji Valinditas dan Reabiitas

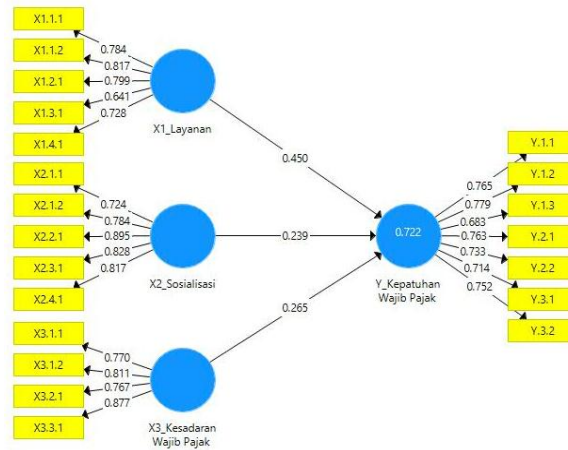
Validitas digunakan untuk membuktikan kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*). Pengujian validitas menggunakan nilai korelasi skoritem dengan skor total variabel. Indeks validitas dihitung menggunakan korelasi *product moment*. Pengujian reliabilitas alat ukur (kuesioner) digunakan untuk mengukur tingkat kekonsistenan respon terhadap item pernyataan kuesioner berdasarkan pemahaman responden terhadap pernyataan dalam kuesioner yang diajukan. Uji Reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Alpha Cronbach*.

Hasil uji validitas menunjukkan semua item pernyataan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai korelasi di atas 0,3 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima) berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 7 item kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Hasil koefisien reliabilitas yang diperoleh untuk setiap variabel lebih besar dari 0,7 sebagai nilai batas suatu instrumen penelitian dikatakan dapat digunakan. Hasil uji validitas semua variabel memiliki pernyataan valid dan reliabel, yang berarti bahwa data penelitian variabel Layanan, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh dari instrumen yang digunakan layak digunakan mengetahui dan menguji permasalahan yang diteliti.

### Pembahasan

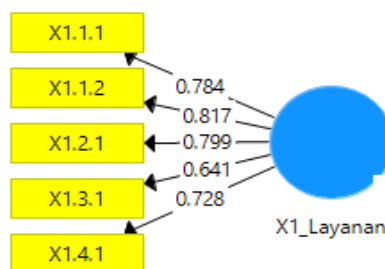
#### A. Pengaruh Layanan, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Hasil penghitungan nilai statistik uji F yang diperoleh menunjukkan F-hitung lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  ( $F = 83,108 > 2,699$ ), maka diperoleh hasil pengujian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil dapat disimpulkan Layanan, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel yang mendominasi kepatuhan wajib pajak ialah variabel layanan. Kemudian variabel kesadaran wajib pajak dan terakhir adalah layanan sosialisasi. Hasil pengaruh Layanan, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 72,2%. Adapun pengaruh faktor lain sebesar 27,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 1. Pengaruh Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

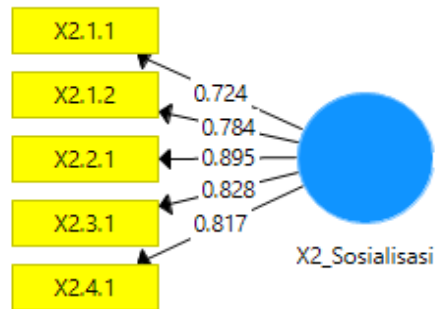


**Gambar Hasil Evaluasi Model Stuktural**

Hasil koefisien pengaruh Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,450 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,879 dan  $p\text{-value} = 0,000$ . Nilai nilai t-statistik yang diperoleh lebih besar dari  $t_{kritis}(1,960)$  dengan demikian hipotesis nol ditolak dan  $p\text{-value} < 0,05$  berarti uji signifikan. Jadi Layanan memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimensi yang mendominasi variable layanan adalah dimensi transparansi dengan indicator

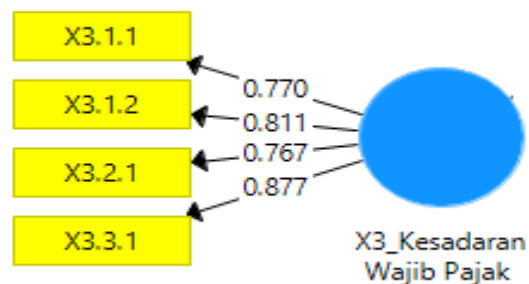
Pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur.

## 2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Hasil koefisien pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,239 dengan nilai thitung sebesar 3,887 dan p-value = 0,000. Nilai nilai t-statistik yang diperoleh lebih besar dari tkrisis (1,960) dengan demikian hipotesis nol ditolak dan p-value < 0,05 berarti uji signifikan. Jadi Sosialisasi memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimensi yang mendominasi variable sosialisasi ialah dimensi Sosialisasi Pajak dengan indikator sosialisasi dilakukan secara teratur.

## 3. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Hasil koefisien pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,265 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,591 dan p-value = 0,011. Nilai nilai t-statistik yang diperoleh lebih besar dari  $t_{krisis}$  (1,960) dengan demikian hipotesis nol ditolak dan p-value < 0,05 berarti uji signifikan. Jadi Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimensi yang mendominasi variabel kesadaran wajib pajak ialah dimensi kondisi keuangan wajib pajak dengan indikator wajib pajak memiliki

kemampuan untuk membayar pajak.

## **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jadi Layanan memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Layanan di Dominasi oleh indicator transparansi dengan Wajib Pajak tidak memiliki Pajak terhutang, kemudian pelayanan dapat dipertanggung jawabkan, transparansi, tidak melakukan tindakan criminal serta sesuai dengan kondisi dan kemampuan .
2. Sosialisasi memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimensi yang mendominasi variable sosialisasi ialah dimensi frekuensi sosialisasi pajak dengan indicator sosialisasi dilakukan secara teratur.
3. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimensi yang mendominasi variable kesadaran wajib pajak ialah dimensi kondisi keuangan wajib pajak dengan indicator wajib pajak memiliki kemampuan untuk membayar pajak.
4. Layanan, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variable yang mendominasi kepatuhan wajib pajak ialah variabel Layanan dengan dimensi transparansi, kemudian variabel kesadaran wajib pajak dengan dimensi kondisi keuangan wajib pajak dan yang terakhir variabel sosialisasi dengan dimensi pengetahuan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro
- Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : Grasindo
- Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P.,2012, Statistika Untuk Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Yogatama, Arya, 2014, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). Semarang.